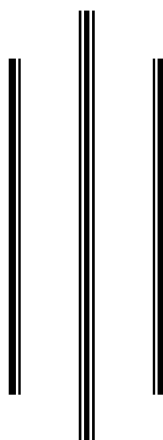




**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
TELP. (0271) 495041, FAK.495522

Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>

E-mail : disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2021 ini kami laporkan sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati Karanganyar.

Selama Tahun Anggaran 2021 kami telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku, namun demikian kami menyadari tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran , masukan yang bersifat membangun akan kami terima demi kemajuan dimasa mendatang.

Karanganyar, 10 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar
Sekretaris

Nurini Retno Hartati, SH.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660929 1991122003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
B A B I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
B A B II : DISKRIPSI SKPD/OPD	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi	5
B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan	
oleh SKP/OPD	11
C. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD ..	14
D. Perda/Perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan	
program dan kegiatan	15
E. Struktur Organisasi (Bagan Struktur Organisasi	
sesuai Perda SOT	16
F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan	17
BAB III : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan	
Dasar	30
B. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan	
Dasar	35
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	36
BAB IV : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAAHAN	
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan	
Pelayanan Dasar	38
B. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan	
Dengan Pelayanan Dasar	68
BAB. V : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
DAN PENUGASAN	
A. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan.....	70
BAB VI : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	73
A. Urusan Pendidikan	
BAB VII : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	
B. Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu faktor strategis untuk mewujudkan daya saing daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan perekonomian daerah dan perkembangan demokrasi karena terkait dengan kecerdasan dan kreatifitas masyarakat. Perlu disadari pula bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan daerah dengan cermat, termasuk perencanaan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sebagai salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Permasalahan pendidikan yang aktual terjadi di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain Masih tingginya angka Rata-rata lama Sekolah & Angka Melek Huruf sebagai variable IPM, Belum optimalnya penguatan kharakter bangsa melalui kurikulum berbasis pendidikan kharakter, Masih tingginya rasio jumlah Guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD, SMP, capaian ini masih perlu didorong untuk mencapai target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua (Educationfor All) pada tahun 2021. Selain itu, belum optimalnya pembinaan dan pengembangan karakteristik seni budaya daerah merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya.

Berikut lampiran target kinerja tahun 2021 yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Pada dasarnya realisasi sudah mencapai diatas target yang terdapat pada RPJMD, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk beberapa macam indikator.

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	
				target	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka partisipasi sekolah	95,05	98,51
2			Angka putus sekolah SD/MI	0,24	0,01
3			Angka putus sekolah SMP/MTs	0,34	0,14
4			Angka melanjutkan	95,05	98,51
5			Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	79	79,65
6			Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	80	86,16
9	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya	87,7	88,80
10			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan	13,15	87,80
11	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	55	82,48
12			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	84,75

Pada pencapaian untuk indikator tujuan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada indikator sasaran diantaranya : Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2021 mencapai 95,51%. Sedangkan Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2021 mencapai 0,01, terjadi penurunan 0,01% dibanding tahun 2020 mencapai

0,02%, sedangkan angka putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)) terjadi penurunan 0,02% dibanding tahun 2020 mencapai 0,12%, pada tahun 2021 sebesar 0,13, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2021 mencapai 95,51%, terjadi kenaikan dari tahun 2020.

Sedangkan ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD/MI pada tahun 2020 mencapai 76,15%, mengalami peningkatan sebesar 1,1% dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 77,25%, untuk ruang kelas pada jenjang SMP/MTs yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2021 mencapai 86,16%, mengalami peningkatan sebesar 8,91% dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 77,25%,

Sasaran Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan pada indikator Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020/2021 mencapai 87%, mengalami peningkatan sebesar 0,87% dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 87,87%, untuk Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2021 mencapai 88,80, mengalami peningkatan sebesar 2,64 dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 86,16.

Untuk sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas pada indikator Nilai SAKIP pada tahun 2020 diperoleh angka 70,77 hal ini meningkat sebanyak 0,35% dibandingkan nilai SAKIP yang diperoleh pada Tahun 2021 diperoleh nilai 82,44; untuk capaian indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 mencapai 82,74 sedangkan pada tahun 2021 sudah mencapai 84,75 hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah memuaskan.

Kebijakan pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk : (a) meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja; (b) Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; (c) meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; (d) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai adalah (a) meningkatnya kualitas pendidikan; (b) meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan; (c) meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas;

B. DASAR HUKUM

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Landasan Hukum :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 nomor 3)
- d. Peraturan Bupati Karanganyar No. 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 82);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 2021 kepada Bupati Karanganyar adalah :

- a. Melaporkan langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu Tahun Anggaran.
- b. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar beserta Jajarannya atas pelaksanaan tugas selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021
- c. Melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh dalam rangka mengatasi permasalahan.
- d. Melaporkan hasil-hasil capaian indikator yang telah dicapai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021

BAB II

DISKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar No. 96 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016); mempunyai :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Budaya; dan
 2. Seksi Cagar Budaya;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan

Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan dan Bidang Kebudayaan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsinya adalah:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta Kesekretariatan;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 5) pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pengkoordinasian tata laksana;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset.
 - c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

c. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan anak usia dini.
- b) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Masyarakat.
- c) Kepala Seksi Sarana Prasarana melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana bidang Pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat.

d. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Dasar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a) Kepala Seksi Pendidikan Dasar melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dasar.
 - b) Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Kepala Seksi Sarana Prasarana melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana bidang Pendidikan Dasar.

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenagaan dan kesiswaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan, mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat
 - b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar.
 - c) Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan Kesiswaan

f. Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan bidang kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis Kebudayaan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Budaya melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan budaya.
 - b) Kepala Seksi Cagar Budaya melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Cagar Budaya.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- 2) pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta Kesekretariatan.
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
x	xx	xx	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
X	xx	xx	02	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
X	xx	xx	03	3	Program peningkatan disiplin aparatur
X	xx	xx	05	4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
X	xx	xx	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1					URUSAN WAJIB
1	01	xx			Pendidikan
1	01	xx	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini
1	01	xx	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	01	xx	18		Program Pendidikan Non Formal
1	01	xx	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	01	xx	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1	17				Kebudayaan
1	17	xx	15		Program Pengembangan Nilai Budaya
1	17	xx	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1	17	xx	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1	17	xx	18		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

C. Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan : Pendidikan

No	Nama SOP	Bidang/Subbag	Keterangan
1	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Ijin Operasional Sekolah (SMP) Swasta	Bidang Dikdas	
2	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Ijin Operasional Sekolah (SD) Swasta	Bidang Dikdas	
3	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Ijin Pendirian Sekolah (SD) Swasta	Bidang Dikdas	
4	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Ijin Pendirian Sekolah (SMP) Swasta	Bidang Dikdas	
5	SOP Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD	Bidang PAUD dan Dikmas	
6	SOP Permohonan dan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM dan LKP	Bidang PAUD dan Dikmas	
7	SOP Bantuan Hibah Konstruksi/Barang/Belanja Langsung	Bidang PAUD dan Dikmas	
8	SOP Legalisir Ijazah Kesetaraan Paket C	Bidang PAUD dan Dikmas	
9	Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Cuti Bersalin Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk/Sd Dan Smp	Bidang PKK	
10	Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Belajar Dan Gelar Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk/Sd Dan Smp	Bidang PKK	
11	Standar Operasional Prosedur Permohonan Karis/Karsu Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk/Sd Dan Smp	Bidang PKK	
12	Standar Operasional Prosedur Permohonan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk/Sd Dan Smp	Bidang PKK	

No	Nama SOP	Bidang/Subbag	Keterangan
13	Standar Operasional Prosedur Permohonan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk/Sd Dan Smp	Bidang PKK	
14	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Seniman	Bidang Kebudayaan	
15	SOP Legalisir Ijazah	Subag UMKEP	
16	SOP Surat Keluar	Subag UMKEP	
17	SOP Surat Masuk	Subag UMKEP	
18	SOP Pelayanan Tamu	Subag UMKEP	
19	SOP Penyusunan Surat Keputusan	Subag UMKEP	
20	SOP Usul Kenaikan Pangkat Pilihan	Subag UMKEP	
21	SOP Usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Subag UMKEP	
22	SOP Usul Kenaikan Pangkat Reguler	Subag UMKEP	
23	SOP Permohonan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	Subag UMKEP	
24	SOP Permohonan Karis/Karsu	Subag UMKEP	
25	SOP Ijin Belajar	Subag UMKEP	
26	SOP Pengajuan Pensiun	Subag UMKEP	
27	Standar operasional prosedur rekonsiliasi data aset tetap dari belanja modal	Subag Keuangan	
28	Standar operasional prosedur pengajuan uang persediaan (up)	Subag Keuangan	
29	Standar operasional prosedur pengajuan ganti uang (gu)	Subag Keuangan	
30	Standar operasional prosedur permohonan pengajuan nomor pokok sekolah nasional (npsn)	Subag Perencanaan	

Urusan : Kebudayaan

Nomor	Nama SOP	Bidang/Subbag	Keterangan
1	SOP Rekomendasi Pendirian Sanggar, Paguyuban, Organisasi Seni Budaya	Bidang Kebudayaan	
2	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin Pentas Sanggar, Peguyuban, Organisasi Seni Budaya	Bidang Kebudayaan	
3	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Fasilitas Kesenian Kepada Pemerintah Kabupaten, Provinsi Dan Pemerintah Pusat	Bidang Kebudayaan	
4	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin Belajar Kesenian Bagi Wna Ke Sanggar/ Pusat Latihan Kesenian Di Wilayah	Bidang Kebudayaan	

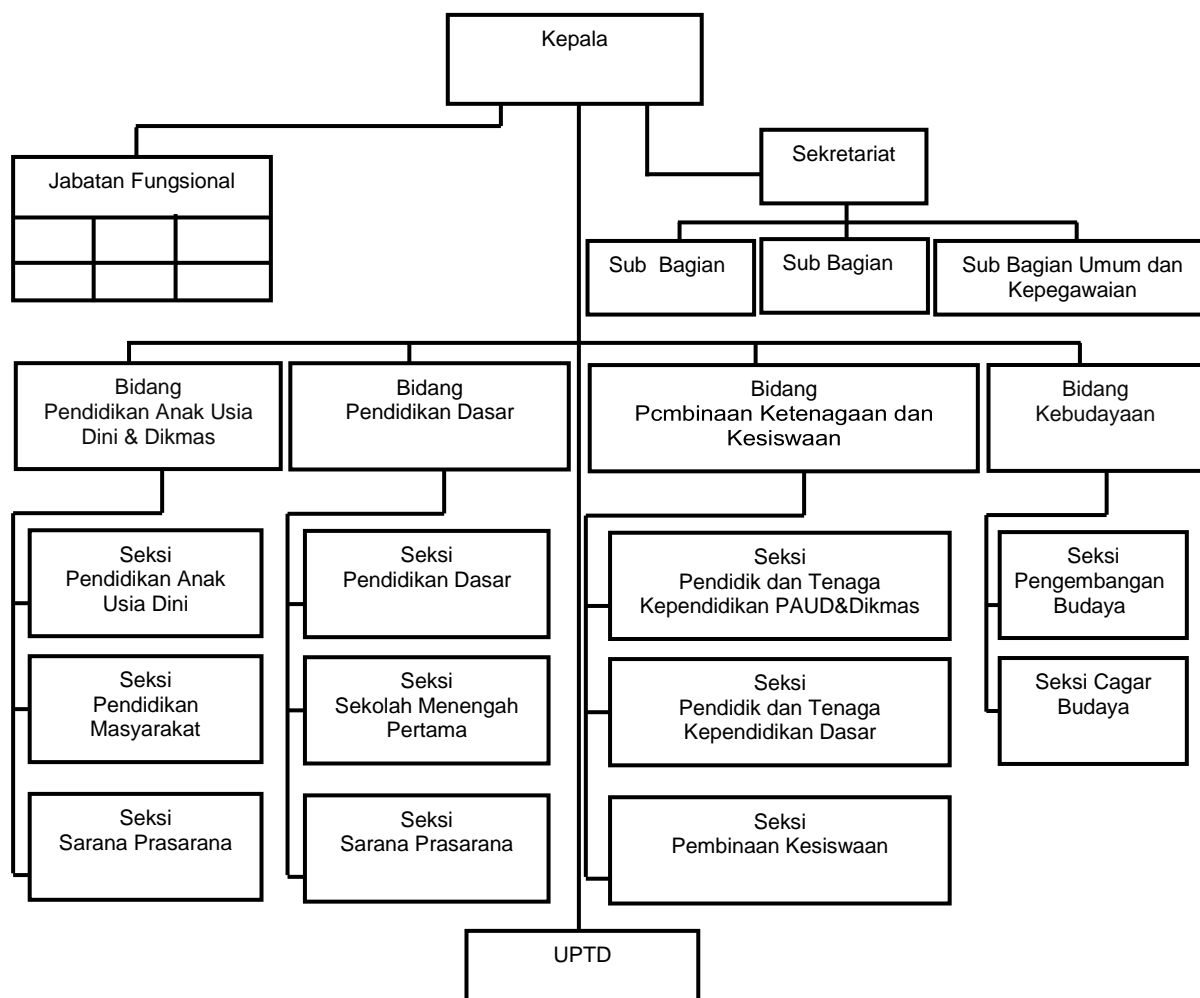
D. Perda/Perbub Pendidikan

Bidang Pendidikan telah menyusun Peraturan Daerah sebanyak 1 PERDA dengan nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 96 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan Tata kerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3). Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Sarana Prasarana.
- 4). Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 - a. Seksi Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama ;
 - c. Seksi Sarana Prasarana;

- 5). Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan;
 - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- 6). Bidang Kebudayaan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Budaya; dan
 - b. Seksi Cagar Budaya;
- 7) Unit Pelaksanaan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dan Sekolah Dasar;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan

- 1) Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
1	Drs. TARSA, M.Pd.	196205111984051003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
2	NURINI RETNO HARTATI, S.H., M.M.	196609291991122003	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
3	SUKARMIN, S.Pd., M.Pd.	196212141988061001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
4	Drs. SUGINA, M.Pd.	196404101988061001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
5	Drs. HERY MULYADI, M.Pd.	196410041986081002	PNS	Pembina, IV/a
6	YAYUK KRISTININGSIH, S.Pd.	196306221986012006	PNS	Pembina, IV/a
7	HERU DWI NUGROHO, S.Pd., M.Pd.	196310271983041003	PNS	Pembina, IV/a
8	Dra. ENDANG TRIHADININGSIH, M.M.	196412051991032003	PNS	Pembina, IV/a
9	Drs. JAKA SUDARMASTA	196304251992031007	PNS	Pembina, IV/a
10	MAMIK SRI UTAMI, S.H., M.M.	196406051992032009	PNS	Pembina, IV/a
11	Dra. ENDANG WINURSITI RR, M.M.	196407191992032005	PNS	Pembina, IV/a
12	SUGENG, S.Pd.	196612241988061002	PNS	Pembina, IV/a
13	HENY SULISTYANINGSIH, S.Pd., M.M.	197202051993032004	PNS	Pembina, IV/a

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
14	AMIRUDIN, S.Pd., M.Pd.	197205151998011003	PNS	Pembina, IV/a
15	NENI KOMANDI SETYOWATI, S.Pd., M.M.	196212181982032007	PNS	Pembina, IV/a
16	HARI WALUYO, S.H., M.M.	197010091998031007	PNS	Pembina, IV/a
17	AGUS PURNOMO, S.Sn., M.M.	197309092000031005	PNS	Pembina, IV/a
18	HERI SUTRISNO, S.Sn., M.M.	197309102000031003	PNS	Pembina, IV/a
19	GENDRO PUJANINGSIH SETIYOWATI, S.Pd., M.M.	196411181986032014	PNS	Pembina, IV/a
20	Dra. ROHMIJATI UTAMI, M.Pd.	196506292000122002	PNS	Pembina, IV/a
21	ENY DWI SURYANI, S.H., M.M.	196902061992032004	PNS	Pembina, IV/a
22	EKO SITI NILARSIH, S.Pd., M.M.	196403151986022003	PNS	Pembina, IV/a
23	TRI WULAN SUPRIBEHASTUTI, S.Pd., M.M.	196703151989032011	PNS	Pembina, IV/a
24	FARYANI SETYOWULAN, S.Sos., M.M.	196804241993032007	PNS	Pembina, IV/a
25	EMY DWI ANDRIYANI, S.E., M.M.	197509071998022001	PNS	Pembina, IV/a
26	SUNARSI, S.Sn.	196708171994032012	PNS	Penata, III/d
27	MUH ARIF WAHYUDI, S.Pd.	196808231994031008	PNS	Penata Tingkat I, III/d
28	NGALIMAN ASHARI, S.Pd.	196305241986011003	PNS	Penata Tingkat I, III/d
29	MUJIYATI, S.Pd.	196407111991032006	PNS	Penata Tingkat I, III/d
30	SAWALDI, S.H.	196410281986071001	PNS	Penata Tingkat I, III/d
31	WARSINI, S.Pd.	196504091988032008	PNS	Penata Tingkat I, III/d
32	SUMARNI, S.Sos.	196311171986022005	PNS	Penata Tingkat I, III/d
33	RISMANTO, S.E.	196505061988061004	PNS	Penata Tingkat I, III/d
34	HARI PRIHARTANTO, S.E.	196609081988101001	PNS	Penata Tingkat I, III/d
35	EDY WAHYUDI, S.E.	197409032000031002	PNS	Penata Tingkat I, III/d

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
36	HASTUTININGDYAH WIJAYATMI, S.S., M.M.	198106022005012012	PNS	Penata Tingkat I, III/d
37	TRI SUWARSINI, S.E.	197708022008012013	PNS	Penata Tingkat I, III/d
38	RETNO DWI ARTININGSIH, S.T.	197903212008012015	PNS	Penata Tingkat I, III/d
39	JOKO TAKARYANTO	196509071986021009	PNS	Penata, III/c
40	SUGENG PRIYANTO, S.E.	196703101989031012	PNS	Penata, III/c
41	SULASMI, S.E.	197304061993032006	PNS	Penata, III/c
42	GIYARTO, S.E., M.M.	197505031998031006	PNS	Penata, III/c
43	NOVI PRAMESTI, S.E., M.Si.	197804252009022002	PNS	Penata, III/c
44	EKO MARYANTO, S.H.	196309091988061001	PNS	Penata, III/c
45	DWI HARYANTI, S.Pd., S.Sos.	196801011994032014	PNS	Penata, III/c
46	ESTER SETIYAWATI, S.Pd., M.Si	196909211999032002	PNS	Penata, III/c
47	GIMAN, S.Sos.	197009091989031001	PNS	Penata, III/c
48	AGUS PRUWITANTO, S.Sos.	197408191999031005	PNS	Penata, III/c
49	SANTOSO NUGROHO, S.E.	197712102010011018	PNS	Penata, III/c
50	DEASY ARI ANAWATI, S.E.	197812222010012009	PNS	Penata, III/c
51	DYAH AYU RETNAWATI, S.E., M.Si.	198003212010012018	PNS	Penata, III/c
52	ANGGIT SETIONO, S.I.P.	197608302011011007	PNS	Penata, III/c
53	PRADA AMARA PUTRA, S.Sos.	197907202010011015	PNS	Penata, III/c
54	REHATTA RAKASIWI, S.Psi., M.Si	198401162011011009	PNS	Penata, III/c
55	JAROT NOVIANTO, S.Psi.	198411212011011009	PNS	Penata, III/c
56	FEBRYANA SEKARINI, S.H., M.Si.	198502282011012025	PNS	Penata, III/c
57	ENDAH CATUR SETYORINI, S.H., M.Si.	198503092011012011	PNS	Penata, III/c
58	JOKO PURWANTO, S.Si., M.Si.	197704262008011018	PNS	Penata, III/c
59	SUNARTI	196604201989032009	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
60	SURATMI	196601141993032004	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
61	WIYANTI	196505291990032008	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
62	BUDIARTI	197102091995032003	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
63	BEJO UTOMO, S.E.	196508171996031004	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
64	NGADIMAN, S.E.	196402041991021001	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
65	DEWI SUPRAPTI, S.Pd.SD.	198502272006042004	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
66	HERMAN PRAKOSO, S.Pd.	196810082014061002	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
67	NGATONO, S.E.	197107161999031006	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
68	AS. JOKO SUSILO, S.Hut	197511192014061001	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
69	SAINO, S.E.	196602111991021002	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
70	BUDIYANI, A.Md.	197910162005022004	PNS	Penata Muda Tingkat I, III/b
71	LARNO	196310151984051002	PNS	Penata Muda, III/a
72	SUYATNO, S.Sos., M.Si.	197107052007011024	PNS	Penata Muda, III/a
73	SUYATI, S.E., M.Si.	197108142007012010	PNS	Penata Muda, III/a
74	ATIK KHOMSIAWATI, S.E., M.Si.	197207172007012009	PNS	Penata Muda, III/a
75	SRI HARTONO, S.Kom., M.Si.	197208052007011029	PNS	Penata Muda, III/a
76	ARI KUNTARTO	197309242008011006	PNS	Penata Muda, III/a
77	SUWARTO, A.Md.	197703172010011010	PNS	Penata Muda, III/a
78	SRI MULYANI, S.Sos.	197511072007012011	PNS	Penata Muda, III/a
79	WARSITI, S.Sos.	197605082007012009	PNS	Penata Muda, III/a
80	AGUS IRAWANTO, A.Md.	197612082010011010	PNS	Penata Muda, III/a
81	ARUM ROSTIKA SARI, A.Md.	197702112010012008	PNS	Penata Muda, III/a
82	SUWARTO, A.Md.	197703172010011010	PNS	Penata Muda, III/a
83	SHOFIAH MASLIKHAH, S.E.	197812222010012001	PNS	Penata Muda, III/a
84	AFNI PREHANTI, S.Sos.	198003272010012001	PNS	Penata Muda, III/a
85	AGUS PRAYITNO	196508172008011014	PNS	Penata Muda, III/a
86	SUGITO, S.Kom.	197402112008011012	PNS	Penata Muda, III/a
87	HASTO NUGROHO W. JATMIKO, S.Kom.	197807192011011004	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
88	SRI MULYONO	196702121992031009	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
89	SUGIYONO	196302172006041006	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
90	BASUKI	196611241990031004	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
91	SUMARNO	196812171994021001	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
92	SRI RAHAYU, A.Ma.	198108082010012003	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
93	SUNARNO	196209072006041010	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
94	SAMINEM	196601102007012015	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
95	WINARMI	196707042007012035	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
96	MULYONO	196911032007011018	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
97	SUPARNO	197001032007011020	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
98	JOKO MIYARNO	197109042007011006	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
99	YUSUF AGUS NUGROHO	197405252007011017	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
100	INDAH KESUMAWATI SAPUTRO, S.H.	197602032007012019	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
101	UNGGUL MURSIDIYONO	197012182008011007	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
102	HARTONO	197701032008011013	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
103	WIJI SUDARMI	197904292008012012	PNS	Pengatur Tingkat I, II/d
104	KURNIANTO DWI SUTARNO	197709222008011005	PNS	Pengatur, II/c
105	TULAS HERMAWAN	196707172009021001	PNS	Pengatur, II/c
106	FRANSISCA ALWIDYASTUTI NAWANDARI	197001292008012012	PNS	Pengatur, II/c

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
107	ERWAN JUNAIDI	197505042009021003	PNS	Pengatur, II/c
108	DWI WAHYUNINGSIH	197510282009022004	PNS	Pengatur, II/c
109	TRI WINARSIH	197803262009022002	PNS	Pengatur, II/c
110	WINARSO	198007172009021004	PNS	Pengatur, II/c
111	TATI NURHAYATI	198207312009022007	PNS	Pengatur, II/c
112	DANI SURYONO	198304102009021008	PNS	Pengatur, II/c
113	DWI SUPRASETIARINI	197610022010012002	PNS	Pengatur, II/c
114	SETI RANU KUSUMO	197807102010011003	PNS	Pengatur, II/c
115	SRI UTAMI	198204022010012005	PNS	Pengatur, II/c
116	WAHYUDI	198305152010011004	PNS	Pengatur, II/c
117	SURYA INDIRIYANTO	198311082010011010	PNS	Pengatur, II/c
118	NURAYU INTAN WAHYUNDARI	198410092010012003	PNS	Pengatur, II/c
119	DWI HARYATMI	197103152008012021	PNS	Pengatur, II/c
120	RATRI PUJI HARTATI	197706182008012020	PNS	Pengatur, II/c
121	ARI SUTEJO	198309282008011009	PNS	Pengatur, II/c
122	JOKO WALUYO	197802182008011013	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
123	TOPO WARSITO	197302052008011010	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
124	JOKO SUWARNO, A.Ma.Pust	197406092014061001	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
125	JOKO RIYANTO	197701302008011013	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
126	REBO BUDIYANTO	197910172008011015	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
127	SLAMET WIDODO	198204022010011003	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
128	MIFTAH TAWAKAL BUDI	197109192008011016	PNS	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
129	SARNO	196701092009021001	PNS	Pengatur Muda, II/a
130	PARYONO	197603052010011003	PNS	Pengatur Muda, II/a
131	SUKARTI	196304132008012002	PNS	Pengatur Muda, II/a
132	SUSWADI	197511162014061001	PNS	Juru Tingkat I, I/d

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
133	Drs. ANDANG MUHAMMAD ENDROBIROWO, M. Hum.	196208231988031011	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
134	Dr. NUNING HIDAYAH SUNANI, M.Hum.	196007051986032013	PNS	Pembina Utama Madya, IV/d
135	Dra. SURATI RAHAYUNINGSIH, M.Pd.	196206181988032004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
136	Drs. SUPARLAN, M.Pd.	196203031987031028	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
137	Drs. WIDODO, M.Pd.	196204221986031018	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
138	SUPARDI, S.Pd., M.Pd.	196206271986011005	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
139	Drs. WARSIDI, M Pd.	196503011995121001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
140	Drs. SURIYANTO, M.Pd	196204021985011003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
141	ENDANG RETNA WULAN, S.Pd.,M.Pd.	196208141985012004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
142	H. MUJIYONO, S.Pd., M.Pd.	196601281987031003	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
143	HANUNG LILIK SUKENDRA, S.Pd., M.Pd., M.M.	196202261983031009	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
144	RUSTINAH, S.Pd., M.M.	196712231991032003	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
145	KASTO, S.Pd., M.Pd.	196105121990071001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
146	Drs. KASWANTO	196110151982011009	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
147	SRI SURARSINI, S.Pd.	196207221982012006	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
148	WINARNO, S.Pd., M.Pd.	196607181988061001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
149	SURONO, S.Pd.	196101211982011017	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
150	Drs. SUHARI, M.Pd.	196601191988061001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
151	TEMON KINASIH, S.Pd., M.Pd.	196607261991022002	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
152	SRI PARTINI, S.Pd., M.Pd.	196312301983042003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
153	ENDANG SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd.	196412291986082002	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
154	Drs. TRI GESANG SUDARSONO	196203051983041004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
155	Dra. TRI SULISTIYANI	196503311985082002	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
156	WURSINI, S.Pd., M.Pd.	196305051986082004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
157	Drs. SUHARSO	196102041984051003	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
158	NINIK SRI RASMINI, S.Pd.	196108101980122004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
159	Dr. Dra. DYAH SULISTYOWATI, M.Pd.	196004211982012018	PNS	Pembina Utama, IV/e
160	NUNUK SRI SUSILAWATY, S.Pd., M.Pd.	196207301982012003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
161	SUDARSONO, S.Pd., M.Pd.	196109241983041002	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
162	SULASNO, S.Pd., M.Pd.	196307061993011002	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
163	ENDANG SRI WURYANI, S.Pd., M.Pd.	196708081991032008	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
164	Drs. SUYANTO, M.Pd.	196208051982011005	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
165	WAHYUNI SRI REJEKI, S.Pd.	196105141980122001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
166	Drs. AGUS SISWANTO, M.Pd.	196508251988061003	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
167	MASRURI, S.Pd.	196502151983041001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
168	Dr. PURWADI, M.Pd.	196312221984051003	PNS	Pembina Utama Madya, IV/d

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
169	Drs. SARDIYANTO	196103191982011004	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
170	Drs. JOKO SANTOSO, M.M.	196202041983041005	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
171	TEGOEH SOEKASNO, S.Pd., M.Pd.	196203211983041006	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
172	SUDARMI, S.Pd., M.M.	196109051982012013	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
173	SARWIASIH, S.Pd.	196103191983042004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
174	Drs. ARIS SANTOSO	196104011983041005	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
175	Dra. SITI MARTINI, M.Pd.	196402021985082004	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
176	SUMARNI, S.Pd.	196112311983032068	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
177	PRIHATIN DWI ASTUTI, S.Pd., M.Pd.	196310061987022001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
178	Dra. RINI ASMIYATI, M.Pd.	196403231986032020	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
179	SRI MULYANI, S.Pd.	196303071983032003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
180	WARINI, S.Pd., M.Pd.	196411251986032013	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
181	MAMIK SUMARMI, S.Pd., M.Pd.	196407191986012005	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
182	ISTINAH, S.Pd., M.Pd.	196111301983032014	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
183	ENDANG DARNI, S.Pd., M.Pd.	196102051986012003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
184	SULARSINI, S.Pd., M.Pd.	196303091986012003	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
185	SRI AMINATININGSIH, S.Pd., M.Pd.	196310141984012001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
186	SUDARYANTI, S.Pd.	196012031982032006	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
187	SUTOYO, S.Sn.,M.Pd.	196810012007011024	PNS	Penata, III/c
188	RUSLAN, S.Pd.	197411172008011009	PNS	Penata, III/c
189	GUNAWAN, S.Pd.	196305201984051005	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
190	Drs. MARJANI	196609181994121001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
191	SUKIYO, S.Pd.	196211141984051001	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
192	TITIEK SUKEKSI, S.Pt.	197004192008012009	PNS	Penata, III/c
193	SABARYATI, S.Pd.	197109262009022002	PNS	Penata, III/c
194	TRI PURWANTO, S.Pd.	197405132007011020	PNS	Penata Tingkat I, III/d
195	IDA SUPRIYATMOKO, S.Pd.	197607072007011037	PNS	Penata, III/c
196	Dra. SUKARTI	196604222006042005	PNS	Penata Tingkat I, III/d
197	SRI RINDOWATI KUSUMANINGRUM, S.Pd.	196309291983042004	PNS	Pembina, IV/a
198	SRIJONO PUDJI SANTOSO, S.T., M.M.	196907162007011023	PNS	Penata Tingkat I, III/d
199	SRI PURWANTININGSIH, S.Pd., M.Pd.	196612301991022003	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
200	Dra. SETYO UTAMI, M.M.	196012031979112001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c
201	SULISTYORINI, S.Pd.	197907062007012010	PNS	Penata Tingkat I, III/d
202	TUTIK SULISTYANINGSIH, S.Pd., M.M.	196208041983032016	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
203	MULYONO, S.Pd.	197209292007011013	PNS	Penata Tingkat I, III/d
204	WITRI NUR AFFIDAH, S.Ag.	197211012007012022	PNS	Penata Tingkat I, III/d
205	KRISTINA ANIK YULIATI, S.Sn.	197707012010012004	PNS	Penata, III/c
206	RISNOWATI, S.Sos.	197102092006042012	PNS	Penata Tingkat I, III/d
207	CORNELIA DWI LESTARI, S.Pd.	196207251988022001	PNS	Pembina Utama Muda, IV/c

NO	NAMA LENGKAP	NIP	STATUS	GOL
208	SAPTONO, S.Pd.	196403021985081002	PNS	Pembina Tingkat I, IV/b
209	ENY FATIMAH, S.Sos.	196907302007012016	PNS	Penata Tingkat I, III/d

2) Daftar Pejabat Struktural OPD Yang Terisi

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Drs. TARSA, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memenuhi	Memenuhi
2	NURINI RETNO HARTATI, S.H., M.M.	Sekretaris	Memenuhi	Memenuhi
3	Drs. JAKA SUDARMASTA	Kepala Sub Bagian Keuangan	Memenuhi	Memenuhi
4	MAMIK SRI UTAMI, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Memenuhi	Memenuhi
5	JOKO PURWANTO, S.Si., M.Si.	Kasubag Umpeg	Memenuhi	Memenuhi
6	Drs. SUGINA, M.Pd.	Kasi SD	Memenuhi	Memenuhi
7	Drs. HERY MULYADI, M.Pd.	Kabid Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan	Memenuhi	Memenuhi
8	YAYUK KRISTININGSIH, S.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Memenuhi	Memenuhi
9	Dra. ENDANG TRIHADININGSIH, M.M.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama	Memenuhi	Memenuhi
10	HENY SULISTYANINGSIH, S.Pd., M.M.	Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dasar	Memenuhi	Memenuhi
11	AMIRUDIN, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat	Memenuhi	Memenuhi
12	NENI KOMANDI SETYOWATI, S.Pd., M.M.	Kepala Seksi Sarana Prasarana	Memenuhi	Memenuhi
13	HARI WALUYO, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	Memenuhi	Memenuhi
14	HERI SUTRISNO, S.Sn., M.M.	Kepala Seksi Pengembangan Budaya	Memenuhi	Memenuhi
15	Dra. ROHMIJATI UTAMI, M.Pd.	Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan	Memenuhi	Memenuhi
16	ENY DWI SURYANI, S.H., M.M.	Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud Dan Dikmas	Memenuhi	Memenuhi
17	SAWALDI, S.H.	Kepala Bidang Kebudayaan	Memenuhi	Memenuhi

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
18	HASTUTININGDYAH WIJAYATMI, S.S., M.M.	Kepala Seksi Cagar Budaya	Memenuhi	Memenuhi
19	GIYARTO, S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana Prasarana	Memenuhi	Memenuhi

3) DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL SKPD/OPD YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STUKTURAL	ESELON
1	Nihil	Nihil

4) Daftar Pejabat Fungsional SKPD (umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	Drs. ANDANG MUHAMMAD ENDROBIROWO, M. Hum.	196208231988031011	Pengawas SMP
2	Dr. NUNING HIDAYAH SUNANI, M.Hum.	196007051986032013	Pengawas SMP
3	Dra. SURATI RAHAYUNINGSIH, M.Pd.	196206181988032004	Pengawas SMP
4	Drs. SUPARLAN, M.Pd.	196203031987031028	Pengawas SMP
5	Drs. WIDODO, M.Pd.	196204221986031018	Pengawas SMP
6	SUPARDI, S.Pd., M.Pd.	196206271986011005	Pengawas SMP
7	Drs. WARSIDI, M Pd.	196503011995121001	Pengawas SMP
8	Drs. SURIYANTO, M.Pd	196204021985011003	Pengawas SMP
9	ENDANG RETNA WULAN, S.Pd.,M.Pd.	196208141985012004	Pengawas SMP
10	H. MUJIYONO, S.Pd., M.Pd.	196601281987031003	Pengawas SMP
11	HANUNG LILIK SUKENDRA, S.Pd., M.Pd., M.M.	196202261983031009	Pengawas SMP
12	RUSTINAH, S.Pd., M.M.	196712231991032003	Pengawas SMP
13	KASTO, S.Pd., M.Pd.	196105121990071001	Pengawas SD
14	Drs. KASWANTO	196110151982011009	Pengawas SD
15	SRI SURARSINI, S.Pd.	196207221982012006	Pengawas SD
16	WINARNO, S.Pd., M.Pd.	196607181988061001	Pengawas SD
17	SURONO, S.Pd.	196101211982011017	Pengawas SD
18	Drs. SUHARI, M.Pd.	196601191988061001	Pengawas SD
19	TEMON KINASIH, S.Pd., M.Pd.	196607261991022002	Pengawas SD
20	SRI PARTINI, S.Pd., M.Pd.	196312301983042003	Pengawas SD
21	ENDANG SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd.	196412291986082002	Pengawas SD
22	Drs. TRI GESANG SUDARSONO	196203051983041004	Pengawas SD
23	Dra. TRI SULISTIYANI	196503311985082002	Pengawas SD

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
24	WURSINI, S.Pd., M.Pd.	196305051986082004	Pengawas SD
25	Drs. SUHARSO	196102041984051003	Pengawas SD
26	NINIK SRI RASMINI, S.Pd.	196108101980122004	Pengawas SD
27	Dr. Dra. DYAH SULISTYOWATI, M.Pd.	196004211982012018	Pengawas SD
28	NUNUK SRI SUSILAWATY, S.Pd., M.Pd.	196207301982012003	Pengawas SD
29	SUDARSONO, S.Pd., M.Pd.	196109241983041002	Pengawas SD
30	SULASNO, S.Pd., M.Pd.	196307061993011002	Pengawas SD
31	ENDANG SRI WURYANI, S.Pd., M.Pd.	196708081991032008	Pengawas SD
32	Drs. SUYANTO, M.Pd.	196208051982011005	Pengawas SD
33	WAHYUNI SRI REJEKI, S.Pd.	196105141980122001	Pengawas SD
34	Drs. AGUS SISWANTO, M.Pd.	196508251988061003	Pengawas SD
35	MASRURI, S.Pd.	196502151983041001	Pengawas SD
36	Dr. PURWADI, M.Pd.	196312221984051003	Pengawas SD
37	Drs. SARDIYANTO	196103191982011004	Pengawas SD
38	Drs. JOKO SANTOSO, M.M.	196202041983041005	Pengawas SD
39	TEGOEH SOEKASNO, S.Pd., M.Pd.	196203211983041006	Pengawas SD
40	SUDARMI, S.Pd., M.M.	196109051982012013	Pengawas SD
41	SARWIASIH, S.Pd.	196103191983042004	Pengawas SD
42	Drs. ARIS SANTOSO	196104011983041005	Pengawas SD
43	Dra. SITI MARTINI, M.Pd.	196402021985082004	Pengawas SD
44	SUMARNI, S.Pd.	196112311983032068	Penilik
45	PRIHATIN DWI ASTUTI, S.Pd., M.Pd.	196310061987022001	Penilik
46	Dra. RINI ASMIYATI, M.Pd.	196403231986032020	Penilik
47	SRI MULYANI, S.Pd.	196303071983032003	Penilik
48	WARINI, S.Pd., M.Pd.	196411251986032013	Penilik
49	MAMIK SUMARMI, S.Pd., M.Pd.	196407191986012005	Penilik
50	ISTINAH, S.Pd., M.Pd.	196111301983032014	Penilik
51	ENDANG DARNI, S.Pd., M.Pd.	196102051986012003	Penilik
52	SULARSINI, S.Pd., M.Pd.	196303091986012003	Penilik
53	SRI AMINATININGSIH, S.Pd., M.Pd.	196310141984012001	Penilik
54	SUDARYANTI, S.Pd.	196012031982032006	Penilik
55	SUTOYO, S.Sn.,M.Pd.	196810012007011024	Penilik
56	RUSLAN, S.Pd.	197411172008011009	Penilik
57	GUNAWAN, S.Pd.	196305201984051005	Penilik
58	Drs. MARJANI	196609181994121001	Penilik
59	SUKIYO, S.Pd.	196211141984051001	Penilik

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
60	TITIEK SUKEKSI, S.Pt.	197004192008012009	Penilik
61	SABARYATI, S.Pd.	197109262009022002	Penilik
62	TRI PURWANTO, S.Pd.	197405132007011020	Penilik
63	IDA SUPRIYATMOKO, S.Pd.	197607072007011037	Penilik
64	Dra. SUKARTI	196604222006042005	Penilik
65	SRI RINDOWATI KUSUMANINGRUM, S.Pd.	196309291983042004	Penilik
66	SRIJONO PUDJI SANTOSO, S.T., M.M.	196907162007011023	Penilik
67	SRI PURWANTININGSIH, S.Pd., M.Pd.	196612301991022003	Penilik
68	Dra. SETYO UTAMI, M.M.	196012031979112001	Penilik
69	SULISTYORINI, S.Pd.	197907062007012010	Penilik
70	TUTIK SULISTYANINGSIH, S.Pd., M.M.	196208041983032016	Penilik
71	MULYONO, S.Pd.	197209292007011013	Penilik
72	WITRI NUR AFFIDAH, S.Ag.	197211012007012022	Penilik
73	KRISTINA ANIK YULIATI, S.Sn.	197707012010012004	Penilik
74	RISNOWATI, S.Sos.	197102092006042012	Penilik
75	CORNELIA DWI LESTARI, S.Pd.	196207251988022001	Penilik
76	SAPTONO, S.Pd.	196403021985081002	Penilik
77	ENY FATIMAH, S.Sos.	196907302007012016	Penilik
78	AGUS IRAWANTO, A.Md.	197612082010011010	Pranata Komputer
79	SUWARTO, A.Md.	197703172010011010	Pranata Komputer
80	HASTO NUGROHO W. JATMIKO, S.Kom.	197807192011011004	Pranata Komputer
81	PRADA AMARA PUTRA, S.Sos.	197907202010011015	Analisis Kepegawaian

a. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL SKPD/OPD YANG BELUM TERISI
(umum/khusus)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pengawas SD	19
2	Penilik	39
3	Analisis Kepegawaian	3
4	Arsiparis	1

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	502,00 lembaga Ket.:	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	Pembilang = 27 947.00 siswa Penyebut = 282 72.00 orang Hasil = 98,85
	2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	36.148,00 siswa Ket.:			
	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	36.148,00 siswa Ket.:			
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2.857,00 siswa Ket.:			
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2.857,00 siswa Ket.:			
	5. Jumlah pendidik pada PAUD	2.857,00 orang Ket.:			
	6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2.445,00 orang Ket.:			
7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki	843,00 orang				

		ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Ket.:			
2	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	578,00 Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100%	Pembilangan = 74180.00 siswa Penyebut = 74180.00 orang Hasil = 100,00
	2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	83.140,00 orang			
3	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	38.343,00 siswa	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100%	Pembilangan = 31932.00 siswa Penyebut = 31932.00 orang Hasil = 100,00
	4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	83.140,00 siswa			
	5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	38.343,00 siswa			
	6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.313,00 orang			

7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.662,00 orang Ket.:		
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.382,00 orang Ket.:		
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.662,00 orang Ket.:		
10.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	334,00 orang Ket.:		
11.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	624,00 orang Ket.:		
12.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	334,00 orang Ket.:		
13.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	624,00 orang Ket.:		
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.591,00 orang Ket.:		
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.595,00 orang Ket.:		
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang	567,00 orang Ket.:		

		memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
	17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	106,00 orang Ket.:		
	18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	96,00 orang Ket.:		
	19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	24,00 orang Ket.:		
4	1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	29,00 lembaga Ket.:	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/ kota yang bersangkutan
	2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.198,00 siswa Ket.:		
	3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.198,00 siswa Ket.:		
	4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	261,00 orang Ket.:		
	5.	Jumlah pendidik	261,00		
					Pembilang = 805.00 siswa Penyebut = 948.00 orang Hasil = 84,92

	pada satuan pendidikan kesetaraan	orang Ket.:		
6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	261,00 orang Ket.:		
7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	567,00 orang Ket.:		
8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	29,00 orang Ket.:		

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Kebudayaan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11,00 cagar budaya Ket.:	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	Pembilangan = 233.00 cabud Penyebut = 233.00 cabud Hasil = 100,00
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11,00 obyek Ket.:			
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11,00 obyek Ket.:			
	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang	0,00 0 Ket.:			

	dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)				
4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	4,00 SDM Ket.:			
5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	233,00 cagar budaya a Ket.:			
6.	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	3,00 cagar budaya a Ket.:			
7.	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0,00 Ket.:			
8.	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	3,00 obyek Ket.:			
9.	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	7,00 jenis Ket.:			
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	4,00 jenis Ket.:			
11.	Peningkatan	4,00			

	akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	jenis Ket.:		
12.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/ kota	3,00 jenis Ket.:		
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1,00 tim Ket.:		
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0,00 Ket.:		
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1,00 jenis Ket.:		
16.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	2,00 jenis Ket.:		
17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/ kota	1,00 jenis Ket.:		
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1,00 jenis Ket.:		
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1,00 jenis Ket.:		

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN	KB JK . S TR A.	PROGR AM	URAIAN KEGIATAN	TARGE T	REAL ISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA M ENGATA SI PERM ASALAHAN
PENDIDI KAN		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 246.425.000,00 Realisasi: Rp. 243.687.600,00 Persentase: (98,89%)	Jumlah Dokumen Peran gkat OPD yang disusun 5 dokume n	5 dokumen (100.00%)		
			2 Koordinasi dan) Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 178.925.000,00 Realisasi: Rp. 178.290.000,00 Persentase: (99,65%)	Jumlah Dokumen RKA yang disusun 167 Dokumen	167 Dokumen (100.00%)		
			3 Koordinasi dan) Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Anggaran: Rp. 40.270.000,00 Realisasi: Rp. 39.129.800,00 Persentase: (97,17%)	Jumlah Dokumen RKA P erubahan yang disusun 167 Dokumen	167 Dokumen (100.00%)		
			4 Koordinasi dan) Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 22.395.000,00 Realisasi: Rp. 22.395.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen DPA yang disusun 167 Dokumen	167 Dokumen (100.00%)		

			5 Koordinasi dan) Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 13.412.800,00 Realisasi: Rp. 13.377.800,00 Persentase: (99,74%)	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun 167 Dokumen	167 Dokumen (100.00%)		
			6 Koordinasi dan) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 182.487.600,00 Realisasi: Rp. 182.407.800,00 Persentase: (99,96%)	Jumlah Laporan yang disusun 8 laporan	8 laporan (100.00%)		
			7 Evaluasi Kinerja) Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 163.850.000,00 Realisasi: Rp. 163.555.000,00 Persentase: (99,82%)	Jumlah Kegiatan yang di evaluasi 167 Kegiatan	167 Kegiatan (100.00%)		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 584.229.584.000,00 Realisasi: Rp. 570.669.335.445,00 Persentase: (97,68%)	Tersedianya Gaji ASN 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		
			2 Penyediaan) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 38.960.000,00 Realisasi: Rp. 38.800.000,00 Persentase: (99,59%)	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dikelola	100% (100.00%)		
			3 Pelaksanaan	Rata-	80 La		

) Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 74.941.709,00 Persentase: (99,92%)	rata Penatausahaan hasil verifikasi yang dilaksanakan 80 Laporan	poran (100.00%)		
			4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.990.000,00 Persentase: (99,96%)	Jumlah /Jenis Dokumen Akuntansi yang disusun 5 Laporan	5 Laporan (100.00%)		
			5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.910.000,00 Persentase: (99,40%)	Jumlah Jenis/Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan	5 Laporan (100.00%)		
			6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.980.000,00 Persentase: (99,80%)	Jumlah Jenis/Dokumen yang diminta 8 Laporan	8 Laporan (100.00%)		
			7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 151.511.000,00 Realisasi: Rp. 145.349.500,00 Persentase:	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 5 Laporan	5 Laporan (100.00%)		

			(95,93%)				
			8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Rp. 6.040.000,00 Realisasi: Rp. 5.960.000,00 Persentase: (98,68%)	Jumlah Jenis/Dokumen Laporan Realisasi Anggaran 8 Laporan	8 Laporan (100.00%)		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Anggaran: Rp. 11.430.000,00 Realisasi: Rp. 11.265.000,00 Persentase: (98,56%)	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Asset yang disusun 85 %	85 % (100.00%)		
			2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran: Rp. 54.000.000,00 Realisasi: Rp. 53.942.500,00 Persentase: (99,89%)	Jumlah Jenis/Dokumen perencanaan, Laporan BMN/Asset yang disusun 85 %	85 % (100.00%)		
			3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran: Rp. 44.570.000,00 Realisasi: Rp. 44.450.000,00 Persentase: (99,73%)	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Asset Yang disusun 85 %	85 % (100.00%)		
			4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi:	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Asset yang	85 % (100.00%)		

			Rp. 24.850.000,00 Persentase: (99,40%)	disusun 85 %			
		Admini strasi K epega waian Perang kat Daerah	1 Peningkatan) Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Anggaran: Rp. 250.000.000,00 Realisasi: Rp. 241.200.000,00 Persentase: (96,48%)	Prosent ase Pegawai yang disipin 100 %	100 % (10 0.00 %)		
			2 Sosialisasi) Peraturan Perun dang-undangan Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 48.858.800,00 Persentase: (97,72%)	Jumlah sosialisasi peratu ran peru ndang u ndanga n yang d ilaksana kan 1 so sialisasi	1 sosi alisan i (100 .00%)		
		Admini strasi Umum Perang kat Daerah	1 Penyediaan) Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 60.001.000,00 Realisasi: Rp. 59.790.000,00 Persentase: (99,65%)	Persent ase Ko mponen instalasi peneran gan kantor yang dis ediakan 85 %	85 % (100. 00%)		
			2 Penyediaan) Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 103.018.750,00 Realisasi: Rp. 101.145.450,00 Persentase: (98,18%)	Persent ase per alatan rumah tangga yang dis ediakan 80 %	80 % (100. 00%)		
			3 Penyediaan) Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 218.130.000,00 Realisasi: Rp. 218.081.000,00 Persentase:	Bahan LOgistik Kantor yang dis ediakan 12 bulan	12 bulan (100. 00%)		

			(99,98%)				
			4 Penyediaan) Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 107.402.100,00 Realisasi: Rp. 104.661.550,00 Persentase: (97,45%)	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 80 %	80 % (100.00%)		
			5 Penyediaan) Bahan/Material Anggaran: Rp. 275.184.050,00 Realisasi: Rp. 273.888.000,00 Persentase: (99,53%)	Bahan/material yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			6 Fasilitasi) Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah tamu terlayani 200 tamu	200 tamu (100.00%)		
			7 Penyelenggaraan) Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 524.970.000,00 Realisasi: Rp. 522.843.544,00 Persentase: (99,59%)	prosentase rapat dan konsultasi yang diselenggarakan 85 %	85 % (100.00%)		
			8 Penatausahaan) Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 78.671.900,00 Realisasi: Rp. 76.334.900,00 Persentase: (97,03%)	Persentase Penataan Arsip yang sesuai dengan peraturan 80 %	80 % (100.00%)		
			9 Dukungan) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Fasilitas internet OPD lancar 85 %	85 % (100.00%)		

			Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 217.000.000,00 Realisasi: Rp. 198.890.000,00 Persentase: (91,65%)				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pengadaan) Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 501.212.500,00 Realisasi: Rp. 489.910.000,00 Persentase: (97,74%)	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik 80 %	80 % (100.00%)		
			2 Pengadaan Aset) Tetap Lainnya Anggaran: Rp. 916.300.000,00 Realisasi: Rp. 19.259.680,00 Persentase: (2,10%)	Persentase aset tetap lainnya yang dicatat dan dimiliki daerah 75 %	75 % (100.00%)		
			3 Pengadaan) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 88.800.000,00 Realisasi: Rp. 88.700.000,00 Persentase: (99,89%)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tercukupi 80 %	80 % (100.00%)		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa) Surat Menyurat Anggaran: Rp. 7.749.800,00 Realisasi: Rp. 5.319.800,00 Persentase: (68,64%)	Jumlah surat yang terkirim 5000 surat	5000 surat (100.00%)		
			2 Penyediaan Jasa) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 403.399.000,00	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 % (100.00%)		

			Realisasi: Rp. 362.623.407,00 Persentase: (89,89%)	tercukup i 100 %			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 230.532.400,00 Realisasi: Rp. 228.361.900,00 Persentase: (99,06%)	Jasa Pe melihara an, biaya pe melihara an dan pajak ke ndaraan dinas tercukup i 100 %	100 % (10 0.00 %)		
			2 Pemeliharaan) Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 100.231.000,00 Realisasi: Rp. 100.186.200,00 Persentase: (99,96%)	Persent ase Per alatan dan mesin lainnya kondisi baik 80 %	80 % (100. 00%)		
			3 Pemeliharaan/Re) habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 264.000.000,00 Realisasi: Rp. 263.972.250,00 Persentase: (99,99%)	Persent ase gedung kantor dan ban gunan lainnya kondisi baik 80 %	80 % (100. 00%)		
		i Pengel olaan P endidik an Sekola h Dasar	1 Penambahan) Ruang Kelas Baru Anggaran: Rp. 1.474.090.000,00 Realisasi: Rp. 1.370.224.500,00 Persentase: (92,95%)	Jumlah penamb ahan Ruang Kelas 7 ruang	7 ruang (100. 00%)		
			2 Pembangunan) Ruang Unit Kesehatan	Jumlah Ruang UKS	3 ruang (100.		

			Sekolah Anggaran: Rp. 243.924.000,00 Realisasi: Rp. 240.485.200,00 Persentase: (98,59%)	yang di bangun 3 ruang	00%)		
			3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Anggaran: Rp. 817.840.000,00 Realisasi: Rp. 810.710.500,00 Persentase: (99,13%)	Jumlah ruang perpustakaan SD yang dibangun 4 ruang	4 ruang (100.00%)		
			4) Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Anggaran: Rp. 1.270.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.261.684.000,00 Persentase: (99,35%)	pembangunan gedung PKG, tempat parkir, pagar, gapura dan talud 8 sekolah	8 sekolah (100.00%)		
			5) Sedang/Berat Ruang Kelas Anggaran: Rp. 3.554.705.000,00 Realisasi: Rp. 3.523.056.200,00 Persentase: (99,11%)	Jumlah ruang kelas yang direhab 25 ruang	25 ruang (100.00%)		
			6) Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Anggaran: Rp. 244.025.000,00 Realisasi: Rp. 241.966.000,00 Persentase: (99,16%)	Jumlah ruang UKS yang direhab 5 ruang	5 ruang (100.00%)		
			7) Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Anggaran:	Jumlah ruang perpustakaan yang	5 ruang (100.00%)		

			Rp. 447.830.000,00 Realisasi: Rp. 442.073.000,00 Persentase: (98,71%)	direhab 5 ruang			
			8 Rehabilitasi) Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Anggaran: Rp. 462.882.000,00 Realisasi: Rp. 458.884.000,00 Persentase: (99,14%)	rehab to ilet/jamb an beserta sanitasi nya 10 sekolah	10 se kolah (100. 00%)		
			9 Penyediaan) Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Anggaran: Rp. 56.609.987.0 00,00 Realisasi: Rp. 54.548.079.3 15,00 Persentase: (96,36%)	Prosent ase siswa p enerima BOS 100 %	100 % (10 0.00 %)		
			10 Pengadaan Alat) Peraga Siswa Anggaran: Rp. 2.590.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.541.137.600,00 Persentase: (98,11%)	Jumlah pengad aan alat peraga/ praktik siswa 8 paket pe ngadaa n alper	8 paket peng adaa n alper (100. 00%)		
			1 Penyelenggaraan) 1 Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Anggaran: Rp. 167.078.600,00 Realisasi: Rp. 163.771.600,00 Persentase: (98,02%)	Proses Belajar mengaja r lancar 85 %	85 % (100. 00%)		
			2 Tindak Lanjut) Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Anggaran:	Jumlah lokasi sekolah yang die valuasi 17 keca	17 ke cama tan (1 00.00 %)		

			Rp. 555.674.000,00 Realisasi: Rp. 523.977.800,00 Persentase: (94,30%)	matan			
			1 Pembinaan 3 Minat, Bakat dan) Kreativitas Siswa Anggaran: Rp. 1.307.826.400,00 Realisasi: Rp. 244.331.400,00 Persentase: (18,68%)	Jumlah prestasi yang diraih 45 %, Jumlah siswa miskin yang me nerima bantuan seraga m 7000 siswa	45 %, 0 siswa (50.0 0%)		
			1 Pengembangan 4 Karir Pendidik) dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Anggaran: Rp. 24.165.355.6 80,00 Realisasi: Rp. 22.573.345.0 60,00 Persentase: (93,41%)	prosent ase guru SD yang me enuhi kekurang an guru SD 80 %	80 % (100. 00%)		
			1 Pembinaan 5 Kelembagaan) dan Manajemen Sekolah Anggaran: Rp. 150.000.000,00 Realisasi: Rp. 149.955.000,00 Persentase: (99,97%)	Jumlah sekolah yang me ngikuti p embinaa n 51 sekolah	51 se kolah (100. 00%)		
			1 Pengelolaan 6 Dana BOS) Sekolah Dasar Anggaran: Rp. 157.795.000,00 Realisasi: Rp. 157.114.000,00 Persentase: (99,57%)	Pengelo laan BOS yang sesuai dan benar 100 %	100 % (10 0.00 %)		
		j Pengel olaan P	1 Penambahan) Ruang Kelas	Pemban gunan	7 ruang		

		endidikan Sekolah Menengah Pertama	Baru Anggaran: Rp. 950.000.000,00 Realisasi: Rp. 948.704.000,00 Persentase: (99,86%)	ruang kelas 7 ruang	(100.00%)		
			2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Anggaran: Rp. 480.000.000,00 Realisasi: Rp. 478.215.500,00 Persentase: (99,63%)	pembangunan aula sekolah 2 ruang	2 ruang (100.00%)		
			3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Anggaran: Rp. 951.987.500,00 Realisasi: Rp. 947.707.500,00 Persentase: (99,55%)	Jumlah ruang kelas yang direhab 5 ruang	5 ruang (100.00%)		
			4) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Anggaran: Rp. 151.500.000,00 Realisasi: Rp. 150.043.000,00 Persentase: (99,04%)	Jumlah ruang laboratorium yang direhab 1 ruang	1 ruang (100.00%)		
			5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Anggaran: Rp. 42.000.000,00 Realisasi: Rp. 40.840.000,00 Persentase: (97,24%)	rehab ruang ibadah di sekolah 1 ruang	1 ruang (100.00%)		
			6) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Prosentase siswa SMP pe	100 % (100.00%)		

			Menengah Pertama Anggaran: Rp. 32.334.463.000,00 Realisasi: Rp. 32.011.412.636,00 Persentase: (99,00%)	nerima BOS 100 %			
			7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Anggaran: Rp. 1.529.820.000,00 Realisasi: Rp. 1.516.089.000,00 Persentase: (99,10%)	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8 paket pe ngadaa n	8 paket pengadaa n (100.00%)		
			8) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Anggaran: Rp. 515.524.000,00 Realisasi: Rp. 506.998.200,00 Persentase: (98,35%)	Persentase proses kegiatan belajar mengajar lancar 85 %	85 % (100.00%)		
			9) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Anggaran: Rp. 229.332.500,00 Realisasi: Rp. 201.071.700,00 Persentase: (87,68%)	Jumlah sekolah yang di evaluasi 51 sekolah	51 sekolah (100.00%)		
			10) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Anggaran: Rp. 649.800.000,00 Realisasi: Rp. 190.170.000,00 Persentase: (29,27%)	jumlah prestasi sekolah yang diraih 20 kejuaraa n	20 kejuaraan (100.00%)	Tidak bisa lelang dik arenakan keterbata san waktu	
			11) Pengembangan Karir Pendidik	prosent ase	86 % (100.		

) dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Anggaran: Rp. 4.812.392.920,00 Realisasi: Rp. 4.570.251.900,00 Persentase: (94,97%)	guru yang memenuhi kekurangan guru SMP 86 %	00%)		
			1 Pembinaan 2 Kelembagaan) dan Manajemen Sekolah Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 49.806.800,00 Persentase: (99,61%)	Kelembagaan dan manajemen sekolah yang dibangun 75 %	75 % (100.00%)		
			1 Pengelolaan 3 Dana BOS) Sekolah Menengah Pertama Anggaran: Rp. 103.255.000,00 Realisasi: Rp. 103.052.900,00 Persentase: (99,80%)	Pengelolaan dana BOS yang sesuai juknis 90 %	90 % (100.00%)		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Pembangunan) Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Anggaran: Rp. 1.100.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.100.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Persentase gedung/ruang kelas/ruang guru dalam kondisi baik 70 %	70 % (100.00%)		
			2 Pembangunan) Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Anggaran: Rp. 455.000.000,00 Realisasi: Rp.	Persentase sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang kondisi	70 % (100.00%)		

			455.000.000,00 Persentase: (100,00%)	baik 70 %			
			3 Rehabilitasi) Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Anggaran: Rp. 125.000.000,00 Realisasi: Rp. 125.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Persentase gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD kondisi baik 70 %	70 % (100.00%)		
			4 Pengadaan) Mebel PAUD Anggaran: Rp. 200.000.000,00 Realisasi: Rp. 199.800.000,00 Persentase: (99,90%)	jumlah pengadaan mebel 200 unit	200 unit (100.00%)		
			5 Pengadaan Alat) Praktik dan Peraga Siswa PAUD Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 99.850.000,00 Persentase: (99,85%)	jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD 20 unit	20 unit (100.00%)		
			6 Penyelenggaraan) Proses Belajar PAUD Anggaran: Rp. 281.000.000,00 Realisasi: Rp. 280.628.000,00 Persentase: (99,87%)	tersedianya materi pembelajaran siswa PAUD 75 %	75 % (100.00%)		
			7 Penyediaan) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Anggaran: Rp. 90.800.000,00 Realisasi: Rp. 90.000.000,00	Jumlah Pengawas TK/PAUD yang tersedia 75 %	75 % (100.00%)		

			Persentase: (99,12%)				
			8 Pengembangan) Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Anggaran: Rp. 1.632.322.500,00 Realisasi: Rp. 1.630.497.000,00 Persentase: (99,89%)	Pendidik PAUD yang terlatih 60 %	60 % (100.00%)		
			9 Pembinaan) Kelembagaan dan Manajemen PAUD Anggaran: Rp. 185.200.000,00 Realisasi: Rp. 184.406.000,00 Persentase: (99,57%)	jumlah lembaga yang dia kreditasi 6 lembaga	6 lembaga (100.00%)		
			10 Pengelolaan Dana BOP PAUD) Anggaran: Rp. 17.588.400.000,00 Realisasi: Rp. 15.721.800.000,00 Persentase: (89,39%)	BOP PAUD yang dikelola dengan benar 80 %	80 % (100.00%)		
		I Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	1 Rehabilitasi) Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Anggaran: Rp. 60.000.000,00 Realisasi: Rp. 60.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah sarana dan pra sarana nonformal/kesetaraan yang direhabilitasi 1 sarana	1 sarana (100.00%)		
			2 Pengadaan) Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Anggaran:	Perlengkapan pendidikan non formal yang	60 % (100.00%)		

			Rp. 200.000.000,00 Realisasi: Rp. 198.750.000,00 Persentase: (99,38%)	tersedia 60 %			
			3) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Anggaran: Rp. 405.000.000,00 Realisasi: Rp. 404.296.000,00 Persentase: (99,83%)	proses belajar non formal/kesetaraan yang dilaksanakan 90 %	90 % (100.00%)		
			4) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.760.000,00 Persentase: (99,20%)	Persentase akreditasi pendidikan non formal/kesetaraan 45 %	45 % (100.00%)		
			5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Anggaran: Rp. 3.195.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.192.762.500,00 Persentase: (99,93%)	Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan non formal/kesetaraan 2 pembinaan	2 pembinaan (100.00%)		
			6) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Anggaran: Rp. 5.102.100.000,00 Realisasi: Rp. 5.102.025.000,00 Persentase: (100,00%)	Persentase administrasi dana BOP pendidikan non formal/kesetaraan tertib dan benar 60 %	60 % (100.00%)		
		Peneta	1 Pelatihan	Jumlah	35 se		

		pan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Anggaran: Rp. 250.000.000,00 Realisasi: Rp. 246.572.500,00 Persentase: (98,63%)	Sekolah yang mengikuti pelatihan kurikulum muatan lokal 35 sekolah	kolah (100.00%)		
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Anggaran: Rp. 15.420.000,00 Realisasi: Rp. 15.370.000,00 Persentase: (99,68%)	Jumlah sekolah SD dan SMP yang mendapatkan ijin operasional 3 sekolah	3 sekolah (100.00%)		
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Anggaran: Rp. 44.800.000,00 Realisasi: Rp. 43.780.000,00 Persentase: (97,72%)	jumlah lembaga yang sudah layak mendapatkan izin operasional 25 lembaga	25 lembaga (100.00%)		

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN	KB JK STRA.	PROGR AM	URAIAN KEGIATAN	TARGE T	REAL ISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA M ENGATA SI PERM ASALAHAN
KEBUDAYAAN		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabup	1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 50.000.000,00	Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan yang diestarisikan 75 %	75 % (100.00%)		

		aten/Kota	Persentase: (100,00%)				
			2 Pembinaan) Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Anggaran: Rp. 304.046.000,00 Realisasi: Rp. 302.673.900,00 Persentase: (99,55%)	Jumlah peserta pembinaan tentang kebudayaan 80 orang	80 orang (100%)		
		Pelestarian Ke seniian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pelindungan,) Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Anggaran: Rp. 1.778.574.200,00 Realisasi: Rp. 1.776.462.200,00 Persentase: (99,88%)	Jumlah pentas seni yang ditampilkan 10 pentas	10 pentas (100%)		
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pelindungan,) Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 99.620.000,00 Persentase: (99,62%)	Persentase pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat yang dikembangkan 65 %	65 % (100%)		
			2 Pembinaan) Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Anggaran: Rp. 58.800.000,00 Realisasi: Rp. 57.630.000,00 Persentase: (98,01%)	Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang terlatih 60 %	60 % (100%)		
		Pembinaan Ke	1 Peningkatan) Pendidikan dan	jumlah peserta	100 orang		

		senian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Anggaran: Rp. 242.356.300,00 Realisasi: Rp. 242.236.300,00 Persentase: (99,95%)	yang mengikuti pelatihan kesenian tradisional 100 orang	(100.00%)		
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1) Penetapan Cagar Budaya Anggaran: Rp. 75.208.500,00 Realisasi: Rp. 75.074.400,00 Persentase: (99,82%)	Cagar budaya yang ditetapkan 75 %	75 % (100.00%)		

C. URUSAN PILIHAN*Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

V.1. Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

V.1.1. Target Kinerja

Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Karanganyar sejumlah 17 lokasi satuan pendidikan dengan 3 kegiatan anggaran sebesar Rp. 1.449.996.000,-. Dengan target kinerja 100% sampai pada 31 Desember 2022.

V.1.2. Realisasi

Dari 3 kegiatan sudah dilaksanakan dengan capaian realisasi yaitu

1. Kegiatan bantuan peralatan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar realisasi 100%,.
2. Kegiatan bantuan peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) realisasi 100%,
3. Kegiatan Bantuan Sanitasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) realisasi 100%.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No	Kementerian /LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat	Program Pengel	bantuan peralatan Berbasis Teknologi Informasi dan	1 SDN 02 Dayu, Gondangrejo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.098.000	100%	
					2 SD N 02 Gondosuli		93.098.000	100%	

No	Kementerian /LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket	
	Teknologi	Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nomor : 15001/C3/KPA/VI/KP/2021 tanggal 11 Juni 2021	olaan Pendidikan Dasar	Komunikasi di Sekolah Dasar	3	SDN 01 Delingan		93.098.000	100%	
4					SDN 03 Berjo	93.098.000		100%		
5					SDN 02 Paseban	93.098.000		100%		
6					SDN 03 Waru	93.098.000		100%		
7					SDN 03 Pereng	93.098.000		100%		
12		Surat Direktur Sekolah Menengah Pertama Nomor 4393/C4/DM.01.02/2021 tanggal 10 Desember 2021	Program pemberian bantuan peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	1	SMPN 3 Jumapolo	88.330.000		100%		
				2	SMP N 3 Satu Atap Kerjo	88.330.000		100%		

No	Kementerian /LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
					3 SMPN 3 Jatipuro		88.330.000	100%	
					4 SMP PGRI 12 Kebakkramat		88.330.000	100%	
					5 SMP Kanisius Bharata 2 Jumapolo		88.330.000	100%	
					6 SMP PGRI 4 Matesih		88.330.000	100%	
					7 SMP Muhammadiyah 6 Jenawi		88.330.000	100%	
13		Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama No : 2066/C4?DM.01.03/2021	Kegiatan Bantuan Sanitasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP)		SMP Muh 4 Mojogedang		60.000.000	100%	
14				SMP Negeri 1 Jumapolo		60.000.000	100%		
15				SMP Negeri 1 Kebakkramat		60.000.000	100%		

Dasar Hukum :

- a) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 15001/C3/KPA/VI/KP/2021 tanggal 11 Juni 2021 Tahun Anggaran 2020.

- b) Surat Direktur Sekolah Menengah Pertama Nomor 4393/C4/DM.01.02/2021 tanggal 10 Desember 2021
- c) Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama No : 2066/C4?DM.01.03/2021, tanggal 12 Juli 2021

BAB VI

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Bidang Pendidikan

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Pendidikan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Jenis pelayanan dasar tersebut dimaksudkan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik sebagai penerima pelayanan dasar secara minimal. Peserta didik sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu wajib mendapatkan pelayanan minimal sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan terdiri atas 3 (tiga) jenis pelayanan yaitu :

- a. Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - b. Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
2. Target Penapaian SPM oleh Daerah
Untuk mengukur ketercapaian SPM Pendidikan, indikator yang menjadi ukuran adalah seberapa besar penduduk pada usia tertentu memperoleh kesempatan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Indikator jenis masing-masing layanan tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Indikator dan target Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Kabupaten/Kota

N	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Formulasi Pengukuran	Target Capaian
1.	Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	$\frac{\text{Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun}} \times 100$	100 %
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar i dalam pendidikan dasar / SD / MI	$\frac{\text{Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$	100 %
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar / SMP / MTs	$\frac{\text{Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$	100 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam	$\frac{\text{Jumlah peserta didik pada jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun}} \times 100$	100 %

		pendidikan kesetaraan		
--	--	--------------------------	--	--

3. Realisasi

Dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diperoleh realisasi capaian Pelayanan Dasar SPM Pendidikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Pencapaian Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Tingkat Kabupaten

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Capaian (6):(4)X 100%
			Jumlah Orang yang Akan	RAPBD 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	27.947	21.757.722.500	27.947	21.757.722.500	100%
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar	74.180	70.053.657.000	74.180	70.053.657.000	100%
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	31.932	42.800.074.920	31.932	42.800.074.920	100%

3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam pendidikan kesetaraan	795	8.932.100.000	795	8.932.100.000	100%
---	-----------------------	---	-----	---------------	-----	---------------	------

4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan	Alokasi Anggaran		
			APBD	APBN	APBD Prov
1	Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21.757.722.500,00		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.100.000.000,00		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	455.000.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	125.000.000,00		
		Pengadaan Mebel PAUD	200.000.000,00		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000,00		
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	281.000.000,00		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	90.800.000,00		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	185.200.000,00		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.588.400.000,00		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.632.322.500,00		
2	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	70.053.657.000,00		
		Penambahan Ruang Kelas Baru	1.474.090.000,00		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	243.924.000,00		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	817.840.000,00		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.270.000.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.554.705.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	244.025.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	447.830.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	462.882.000,00		

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	56.609.987.000,00		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.590.000.000,00	651.686.000,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	167.078.600,00		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	555.674.000,00		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.307.826.400,00		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	157.795.000,00		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24.165.355.680,00		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	42.800.074.920,00		
Penambahan Ruang Kelas Baru	950.000.000,00		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	480.000.000,00	180.000.000,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	951.987.500,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	151.500.000,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	42.000.000,00		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	32.334.463.000,00		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.529.820.000,00	618.310.000,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	515.524.000,00		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	229.332.500,00		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	649.800.000,00		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	103.255.000,00		

		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.812.392.920,00		
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.932.100.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	60.000.000,00		
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00		
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	405.000.000,00		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.195.000.000,00		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.102.100.000,00		

5. Dukungan Personil

1. Dukungan Personil

Tabel 2.4
Data Dukungan Personil

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Personil
1	2	3	4
1	Pendidikan PAUD	Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	27.947
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan	74.180

		dasar dalam pendidikan dasar /SD/MI	
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	31.932
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam pendidikan kesetaraan	795

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan Dalam Capaian SPM

1. Permasalahan :

Masih kurangnya tenaga pendidik TK/PAUD untuk memenuhi standar 1:15.

Solusi :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berinisiatif untuk mengangkat guru honorer untuk mencukupi kekosongan guru yang sebagian besar sudah pensiun.

2. Permasalahan :

1) Belum adanya tenaga administrasi jenjang SD sehingga dalam penyusunan administrasi sekolah kurang optimal;

2) Sarana dan prasarana sekolah Pendidikan dasar sudah banyak ruang kelas rusak berat;

3) Kurangnya SDM maupun Tenaga guru di jenjang SD. Solusi :

(a) Guru merangkap sebagai tenaga administrasi;

(b) Mengangkat dari guru honorer;

(c) Mengusulkan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk penanganan masalah sarana dan prasarana.

3. Permasalahan :

a) Kebanyakan dari kalangan ekonomi ke bawah;

b) Adanya anak berkebutuhan khusus;

c) Sulitnya transportasi ke sekolah-sekolah atau PKBM-PKBM yang harus ditempuh karena tidak memiliki kendaraan sendiri.

Solusi :

a. Perlunya dukungan orang tua;

b. PKBM setempat mendatangi ke rumah-rumah penduduk untuk mengajak sekolah Kembali.

4. Permasalahan:

Operator Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar hanya bisa melihat peserta didik yang sekolah di Kabupaten Karanganyar, sedangkan peserta didik yang sekolah di luar Kabupaten Karanganyar tidak bisa diketahui. Hal ini menyebabkan angka anak pra ATS (yang diduga ATS) menjadi tinggi

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	SIYAP MAS INDRO	Sistem Informasi Layanan Publik Melalui Aplikasi Berbasis Android

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Apresiasi Penggerak Perempuan	Kemendikbud, Riset dan Teknologi
2	Best Practise PJJ	PGRI
3	Final Kompetisi Sain Terbuka (KST) PPO Jateng ke-5	Perkumpulan Pembina OSN Jateng
4	Gold Award	Indonesia Math Contest (IMC)
5	Indonesia Talent Week (Guru Berani Menginspirasi)	Erlangga
6	Juara III Lomba News Reading In English jenjang SD/MI	Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah
7	Juara II Lomba IPA Jenjang SD/MI	Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah
8	Juara I Lomba Hafidzil Qurán Jenjang SD/MI	Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah
9	Juara I Lomba Matematika Jenjang SD/MI	Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah
10	Juara I Lomba Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah
11	Medali Perak	Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah
12	Peringkat 3 Kompetisi Sain Nusantara	Lembaga Junior Club Semarang
13	Teacher Literacy Award	GMB Indonesia

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, walaupun masih banyak kekurangan dan permasalahan yang dihadapi, namun secara keseluruhan baik capaian indikator maupun realisasi anggaran pada tahun 2021 dapat dicapai melebihi dari target yang ditentukan.
2. Semua program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tertumpu pada 3 pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional yaitu 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan, serta 3) Penguatan Tata Kelola akuntabilitas dan pencitraan publik pengelolaan pendidikan. Acuan program dan kegiatan sesuai permendagri Nomor 90 tahun 2019 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD.
3. Anggaran pendidikan, yaitu berupa honor guru tidak tetap, pemenuhan buku teks pelajaran, Sarana dan Prasarana Sekolah maupun kebutuhan menggambar untuk jenjang TK, SD dan SMP untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah dialokasikan sesuai ketentuan walaupun .

A. SARAN

1. Anggaran pendidikan pada belanja langsung, yaitu Sarana dan Prasarana Sekolah jenjang SD dan SMP perlu ditingkatkan karena untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masih jauh untuk mencapai target.
2. Belanja pemeliharaan perlu ditingkatkan, karena banyaknya kantor Korwil dimasing – masing Kecamatan sudah perlu pembenahan, dan kegiatan yang harus ditangani sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi sangat membantu dalam melengkapi kekurangan anggaran APBD Kabupaten, maka perlu dipertahankan.
4. Sebaiknya alokasi DAK, maupun bantuan APBD Provinsi tidak dihitung ulang dalam APBD Kabupaten sehingga tidak mengurangi prosentase anggaran pendidikan.
5. Perlu adanya tenaga Administrasi di jenjang SD karena Sumber Daya Manusia (SDM) jenjang SD belum mencukupi, sehingga

6. Perlu adanya rekrutmen tenaga pendidik pada jenjang SD dikarena belum mencukupi setelah ASN lama pensiun.

Karanganyar, 10 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar
Sekretaris

Nurini Retno Hartati, SH.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660929 1991122003